

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan literatur dan buku-buku maupun arsip mengenai permasalahan peranan *De Javasche Bank* dalam perekonomian Hindia Belanda 1900-1942, maka peneliti menyimpulkan bahwa perekonomian Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perkebunan-perkebunan. Karena selama lebih dari satu abad, perkebunan merupakan aspek terpenting dalam perekonomian Hindia Belanda. Hal ini dimulai dengan diberlakukannya sistem tanam paksa, dimana masyarakat khususnya petani di Jawa dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia untuk meningkatkan perekonomian Hindia Belanda. Kemudian dengan masuknya para pengusaha swasta yang menanamkan modalnya pada perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan luar pulau Jawa.

Perkebunan memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di banyak wilayah di Hindia Belanda. Perkembangan perkebunan pada satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Hindia Belanda dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan finansial yang besar, serta membuka kesempatan ekonomi baru. Namun disisi lain perkembangan perkebunan juga dianggap sebagai kendala bagi diversifikasi ekonomi masyarakat yang lebih luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Hindia Belanda merupakan sejarah perkebunan itu sendiri. Sejak awal kedatangan bangsa

Barat yang mengidentifikasi diri sebagai pedagang sampai masa-masa ketika Barat identik dengan kekuasaan kolonial dan pemilik modal, perkebunan menjadi salah satu fakta yang tidak bisa diabaikan

Meningkatnya arus lalu lintas perdagangan dan perindustrian di Hindia Belanda terutama yang berasal dari perkebunan dengan masuknya modal-modal swasta, dikalangan para pengusaha dagang dan pertanian Belanda merasakan perlu adanya suatu lembaga keuangan dan perbankan di Hindia Belanda yang dapat membantu kegiatan mereka dalam perdagangan. Bukan hanya kalangan pedagang saja yang mengharapkan bantuan modal dari negeri Belanda, pemerintah Hindia Belanda pun sangat membutuhkan bantuan dan pinjaman dari pemerintah negeri Belanda. Selain itu, pembentukan sebuah bank sangat diperlukan untuk segera mengisi kekurangan alat pembayaran yang telah dirasakan sangat mendesak oleh karena peredaran uang hampir seluruhnya terdiri dari uang tembaga. Atas perintah Raja Willem I, maka *De Javasche Bank* didirikan. Fungsi dan peranan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi berkembang secara gradual berdasarkan oktrooi yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. *De Javasche Bank* diberi posisi monopoli dalam pengeluaran uang kertas, dan juga bergerak dibidang komersil dengan menerima deposito, memberikan kredit, mengaksep wesel, serta melakukan jual beli emas dan perak batangan.

Pada umumnya *De Javasche Bank* memprioritaskan kegiatan kreditnya kepada pihak importir dengan jaminan surat berharga (*promissory notes*). Sampai dengan tahun 1850-an, *De Javasche Bank* merupakan satu-satunya lembaga keuangan swasta bangsa Belanda yang berkantor pusat di Batavia (Hindia

Belanda) yang memberikan pinjaman kepada importir dan pengusaha-pengusaha perkebunan swasta.

Dalam perjalanan sejarahnya, *De Javasche Bank* dapat disebut sebagai bank komersil yang beroperasi berdasarkan oktrooi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda secara periodik. Namun begitu dalam batas-batas tertentu, sebenarnya *De Javasche Bank* telah bertindak dalam fungsi-fungsi yang hanya dapat dilakukan oleh sebuah bank sentral, sekalipun tidak berkedudukan resmi sebagai bank sentral. Dengan kata lain, *De Javasche Bank* dapat disebut sebagai bank perkreditan dengan hak menerbitkan uang kertas (*note-issuing credit bank*). Pada saat diberlakukannya *De Javasche Bankwet* 1922, hak monopoli *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda mulai dibatasi oleh pemerintah. Dalam menerbitkan kebijakan moneterinya, *De Javasche Bank* terlebih dahulu harus mendapatkan pengarahannya dari pemerintah negeri Belanda.

Tujuan utama yang harus dicapai oleh *De Javasche Bank* adalah kesatuan sistem moneter antara Hindia Belanda dan negeri Belanda dengan mempertahankan nilai tukar resmi antara kedua mata uang dalam paritas satu banding satu. Tanggung jawab itu hanya dua kali mengalami gangguan, pertama ketika terjadi krisis keuangan tahun 1930-an dan kedua terjadi pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II.

De Javasche Bank berkembang dengan pesat, jumlah uang kertas yang diizinkan pemerintah untuk dicetak oleh *De Javasche Bank* tiap tahun terus meningkat. Kemajuan ini jelas terlihat dengan dibukanya cabang-cabang di pelbagai kota di seluruh Nusantara. Dengan dibukanya cabang *De Javasche Bank*

di Amsterdam, yang diberi status sebagai “*Bijbank*” pada tanggal 15 Mei 1891, lalu lintas pembayaran dengan negeri Belanda dengan menggunakan wesel luar negeri dapat diselenggarakan dengan sangat lancar. Menyimpan dan mengelola cadangan devisa pemerintah menjadi sangat penting sesudah kepemilikan dan lalu lintas alat-alat pembayaran luar negeri diatur pada tahun 1940.

De Javasche Bank tidak bisa sepenuhnya mengembangkan kebijakan moneter yang independen bagi Hindia Belanda. Semua perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Hindia Belanda masih berdomisili di negeri Belanda dan karena itu seluruh dana surplus harus ditransfer ke kantor pusat mereka masing-masing. Bahkan devisa hasil ekspor Hindia Belanda praktis seluruhnya diterima oleh negeri Belanda. Lebih dari itu, obligasi pemerintah dan surat-surat berharga yang tinggi tingkat labanya dan menjadi objek investasi yang menarik, menurut peraturan hanya bisa diterbitkan di negeri Belanda. Semua kelebihan likuiditas maupun uang yang hendak diwujudkan dalam tabungan pribadi di Hindia Belanda selalu ditransfer ke negeri Belanda. Dapat disimpulkan bahwa *De Javasche Bank* tidak bertindak sebagai bank untuk bank lain atau kreditor terakhir, *De Javasche Bank* hanya sekedar mengurus administrasi transfer dari lembaga-lembaga keuangan di negeri Belanda ke Hindia Belanda.